KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui Danantara
**Tanggal** : Kamis, 21 Mei 2026
**Surat Kabar** : Kompas
**Halaman** : 1-15

# Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui Danantara

Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI bakal berperan sebagai "trader" komoditas sumber daya alam strategis. Kehadiran DSI memicu beragam pendapat.



**Presiden Prabowo Subianto** berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Presiden menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) R-APBN 2027.

**JAKARTA, KOMPAS** — Danantara Sumberdaya Indonesia akan mengambil alih ekspor komoditas sumber daya alam atau SDA strategis dari perusahaan swasta. Untuk sementara, komoditas ekspor yang ditangani adalah sawit, batubara, dan paduan logam atau *ferro-alloy*.

DSI merupakan anak usaha Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) yang didirikan pada 18 Mei 2026. DSI akan berperan sebagai *trader* atau pembeli dan penjual komoditas SDA strategis.

Kebijakan itu ditempuh setelah pemerintah menemukan indikasi praktik manipulasi pelaporan ekspor, baik harga maupun volume. Akibatnya, hanya sebagian nilai perdagangan komoditas strategis yang tercatat di dalam negeri.

Terkait hal tersebut, pemerintah menilai perlunya skema pengawasan baru untuk memperkuat transparansi, menjaga devisa hasil ekspor tetap di dalam negeri, dan menambah penerimaan negara dari sektor SDA.

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan arah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), mengungkapkan bahwa potensi kebocoran devisa akibat praktik

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

>> BACA JUGA:
**Investor Cermati Kebijakan Pemerintah**
Pembentukan badan ekspor komoditas yang membuat ekspor SDA melalui BUMN menjadi perhatian investor.
KOMPAS.ID
komp.as/cermati
BACA JUGA HLM 2 DAN 6

**Skema PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam**




Sumber: Pemberitaan TV Parlemen, Diolah Litbang Kompas/BDA

INFOGRAFIK: ISMAWAN

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

# Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui

(Sambungan dari halaman 1)

manipulasi ekspor mencapai 150 miliar dolar AS per tahun.

Menurut Presiden, keberhasilan menyelamatkan potensi penerimaan tersebut bergantung pada keberanian pemerintah dalam membenahi tata kelola dan memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam.

Dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna, Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pembentukan DSI bertujuan untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis dan meningkatkan transparansi transaksi.

"Intinya transparansi transaksi, baik dari segi volume, *pricing* (pemberian harga), maupun *delivery* (pengiriman). Kita ingin mencapai mekanisme yang baik dan benar untuk memberikan nilai tambah bagi kita semua," ujar Rosan.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir di tempat terpisah mengatakan, DSI akan menjalankan tiga peran. Pertama, memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan. Dengan kata lain, DSI akan memastikan transaksi perdagangan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar.

Kedua, lanjut Pandu, mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal. Ketiga, melakukan konsolidasi data dan efisiensi tata kelola ekspor komoditas SDA strategis.

"Skema baru itu diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Komoditas SDA itu milik Indonesia untuk dunia sehingga perlu dikelola demi kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," katanya, di Jakarta.

Kebijakan itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor SDA melalui BUMN. Pasal 6 draf PP itu menyebutkan tentang fase peralihan dan pemberlakuan penuh kebijakan ekspor komoditas SDA strategis dari perusahaan swasta ke BUMN ekspor.

Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Rohan Hafas menjelaskan, fase pertama atau peralihan akan berlangsung pada 1 Juni 2026 hingga 31 Desember 2026. Pada fase tersebut, DSI akan berfungsi sebagai pengawas lalu lintas ekspor komoditas SDA strategis.

DSI akan memastikan transaksi ekspor sejumlah komoditas itu dilakukan sesuai harga pasar dan mencegah praktik *under invoicing* dan *under pricing*.

Fase kedua atau pemberlakuan penuh, lanjut Rohan, bakal berlangsung setelah 31 Desember 2026. Dalam fase tersebut, DSI akan mengambil alih sepenuhnya ekspor sejumlah komoditas SDA strategis serta akan berperan sebagai *trader* atau pembeli dan penjual sejumlah komoditas strategis. DSI akan membeli komoditas SDA strategis dari para pelaku usaha dalam negeri sesuai harga pasar atau sejumlah bursa komoditas global sehingga tidak mematikan bisnis mereka. Kemudian, DSI akan mengekspornya sesuai dengan harga pasar.

"Hasil ekspor dalam berbagai bentuk mata uang, termasuk dolar AS, itu akan sepenuhnya dijadikan devisa negara. Tidak ada lagi 'parkir' devisa di bank-bank luar negeri," katanya.

## Menambah penerimaan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pembentukan badan ekspor berpotensi menambah penerimaan negara secara signifikan. Menurut dia, lembaga tersebut dirancang untuk menutup celah praktik *under invoicing*.

Ia mengatakan, temuan itu diperoleh setelah Kementerian Keuangan membentuk Tim 10 di National Single Window (NSW) untuk menelusuri pola ekspor. Hasil penelusuran menunjukkan adanya perbedaan harga yang mencolok antara nilai ekspor dari Indonesia ke Singapura dan harga jual akhir di pasar Amerika Serikat.

"Dari *ship to ship* saya bisa lihat volume kapal ini ke Singapura berapa, harganya berapa. Terus, saya juga bisa lihat kapal yang sama masuk ke Amerika lewat dari sini ke sana berapa harganya. Kapalnya sama, volumenya sama, tetapi harganya berbeda," katanya.

Menurut Purbaya, kondisi tersebut membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan besar, mulai dari pajak penghasilan hingga penerimaan ekspor lainnya. Praktik serupa, ucapnya, juga mulai ditemukan pada ekspor batubara ke India.

## Risiko besar

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan bahwa pengalihan ekspor komoditas SDA strategis dari swasta ke BUMN memiliki sejumlah risiko besar yang perlu diwaspadai. Risiko tersebut meliputi terganggunya rantai pasok ekspor yang sudah mapan, ketidakjelasan mekanisme penentuan harga internasional yang berpotensi menekan harga di tingkat pengusaha dan petani, serta ancaman hilangnya pasar ekspor akibat hilangnya kepercayaan pembeli global atas kerahasiaan formula produk.

Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan dapat mematikan para *trader* kecil yang menyasar pasar nontradisional, seperti Afrika. Oleh karena itu, Gapki meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan ini dengan sangat hati-hati dan tetap membuka ruang evaluasi guna mengoreksi aturan jika tidak berjalan baik di lapangan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan, APBI belum pernah diundang untuk mendiskusikan kebijakan baru itu. Saat ini, APBI masih mencermati dan mencoba memahami secara utuh arah kebijakan ini.

"Kebijakan tersebut merupakan hal yang baru dan berpotensi membawa perubahan besar terhadap tata kelola ekspor komoditas, termasuk batubara," ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Gita mengangatkan, rantai bisnis ekspor batubara memiliki ekosistem dan kontrak yang sudah terstruktur. Ia juga minta pemerintah berhati-hati.

Sementara itu, Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai, kebijakan ekspor sawit oleh BUMN berpotensi mengubah struktur perdagangan serta memicu monopoli dan praktik rente seperti era Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh di Orde Baru. Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menyesalkan minimnya pelibatan petani dalam kebijakan satu pintu ini, yang dikhawatirkan akan menurunkan daya tawar petani dan menekan harga tandan buah segar akibat hilangnya akses langsung ke pasar global.

(HEN/DIM/ERK/N1A)